

RENCANA STRATEGIS

2025 – 2029

**BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas RahmatNya Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Pada dokumen Rencana Strategis ini menyajikan gambaran perencanaan dapat diselesaikan dan ditetapkan

RENSTRA Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Balikpapan dirumuskan dengan tahapan, tatacara serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundang undnagan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BAdan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sejalan dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, yaitu : **"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman"**

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dalam 5 (lima) tahunan Badan Pengelola Pajak DAerah dan Retribusi Daerah sehingga dapat terujud Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Renstra ini diucapkan terima kasih. Se,oga Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan yang kita cintai.

Balikpapan, 15 September 2025

KEPALA BPPDRD,



DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar Isi..... ii

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel.....iv

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan3

1.4 Sistematika Penulisan4

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH5

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....5

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....13

2.2.1 Sumber Daya Manusia13

2.2.2 Aset14

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah17

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....22

2.4.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....22

2.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....26

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah26

3.2 Casading Kinerja30

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan31

BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN33

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....33

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan52

BAB V PENUTUP55

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi
Retribusi Daerah Kota Balikpapan13

Gambar 2.2 Pembayaran Online Pajak Daerah19

Gambar 2.3 Pemasangan Stiker untuk Wajib Pajak yang Menunggak20

Gambar 3.3 Monitoring Objek Pajak Hiburan Konser Musik.....20

Gambar 2.5 Sosialisasi Pajak Daerah.....21

Gambar 3.1 Cascading Kinerja BPPDRD30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin14

Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Golongan14

Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan14

Tabel 2.4 Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah Kota Balikpapan15

Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja BPPDRD17

Tabel 2.6 Perbandingan PAD Tahun 2022, 2023 dan 202418

Tabel 2.7 Analisis S-W-O-T Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan23

Tabel 2.8 Identifikasi Permasalahan24

Tabel 2.9 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis BPPDRD25

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPPDRD27

Tabel 3.2 Arah Kebijakan BPPDRD31

Tabel 4.1 Program Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah34

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPPDRD35

Tabel 4.3 Program dan Pendanaan BPPDRD40

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas BPPDRD52

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPDRD53

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPPDRD54

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman rencana pembangunan jangka menengah di lingkungan Perangkat Daerah yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan strategis penganggaran pendapatan dan belanja kegiatan yang selanjutnya dilaksanakan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selaku pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Secara umum Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2025 - 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman dalam hal :

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), dokumen perencanaan tahunan periode masa perencanaan Renstra yang digunakan sebagai dasar penganggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahunnya;
2. Pedoman dalam pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanahkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah antara Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pemerintah Kota Balikpapan

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam penyusunan RENSTRA Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
14. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki maksud yaitu tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan perangkat daerah tersebut dijabarkan dengan berpedoman pada dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Hal yang dipedomani pada Renstra Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah strategi, arah

kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang pada RPJMD agar terjaminnya keselarasan antar dokumen perencanaan.

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Dokumen Renstra Perangkat daerah sebagai pedoman perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dalam melaksanakan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan bidang urusan pemerintah sebagaimana yang diatur pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Mewujudkan pencapaian Akuntabilitas pada Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah berdasarkan target *outcome* (hasil) dan *output* (keluaran) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Balikpapan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun kerangka sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas 4 (Empat) BAB sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Cascading Kinerja
- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran Umum Perangkat Daerah, analisis gambaran serta permasalahan dan isu strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mewujudkan fokus tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tersebut, adapun fungsi dari perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;

5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
7. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan 9 (Sembilan) fungsi organisasi tersebut, maka dibutuhkan uraian tugas dan fungsi yang diemban pada tiap jabatan susunan organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi
 - Melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah
 - Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
 - Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
 - Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya
 - Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah
 - Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah
 - Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- b. Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIAT

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;
- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;

- m. Pengendalian pelaksanaan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;

- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;
- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;

- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

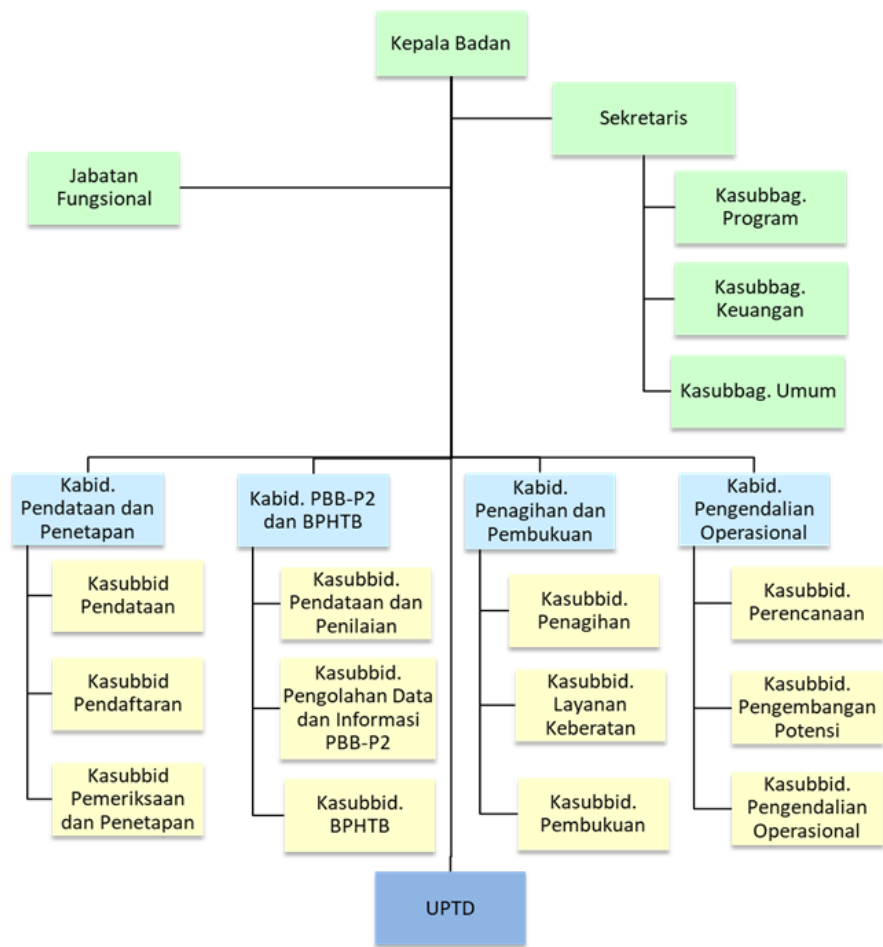
- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Balikpapan



Sumber: data diolah, BPPDRD tahun 2025

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci

yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi.

Tabel 2.1

Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	PNS	51 orang	21 orang
2	PPPK	19 orang	12 orang
3	NABAN		2 orang

Sumber : data diolah, BPPDRD 2025

Tabel 2.2

Data Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	7 orang
2	Golongan III	62 orang
3	Golongan II	33 orang
4	Golongan I	1 orang
5	NABAN	2 orang
Jumlah		105 Orang

Sumber : data diolah, BPPDRD 2025

Tabel 2.3

Data Pegawai Menurut Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Latar Pendidikan (jumlah dalam orang)								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	PNS	5	16	2	14	-	4	31	-	-
2	PPPK	1	14	-	4	-	-	11	-	-
3	NABAN	-	2	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : data diolah, BPPDRD 2025

2.2.2 Aset

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Sehubungan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, selanjutnya pemerintah pusat menetapkan peraturan mengenai pedoman pengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu diingat bahwa pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian terpisah dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara.

Tabel 2.4
Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Kota Balikpapan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	BPPDRD	1.119	14.975.441.277
	KOMPUTER	452	5.707484.786
	- Internet	1	14.600.000
	- Komputer Jaringan lainnya	4	24.200.000
	- P.C Unit	61	719,607,000.00
	- Lap Top	20	177,994,000.00
	- Note Book	12	134,160,000.00
	- Personal Komputer lainnya	9	143,499,400.00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	32	70,240,500.00
	- Monitor	46	226,312,000.00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	111	940,344,750.00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	84,920,000.00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	29	824,347,716.00
	- Server	13	1,043,351,000.00
	- Router	3	10,363,000.00
	- Modem	1	1,000,000.00
	- Switch	2	18,645,000.00
	ALAT ANGKUTAN	70	2,377,790,000.00
	- Station Wagon	12	1,562,286,500.00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	210,000,000.00
	- Sepeda Motor	54	605,503,500.00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	324	3,051,614,892.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	1	1,275,000.00
	- Mesin Hitung Listrik	1	4,250,000.00
	- Mesin Perekam Stensil Folio	1	1,815,000.00
	- Lemari Besi/Metal	55	144,201,800.00
	- Lemari Kayu	5	9,100,000.00
	- Rak Besi	1	14,740,000.00
	- Rak Kayu	3	3,060,000.00
	- Filing Cabinet Besi	1	1,105,000.00
	- Brandkas	1	2,000,000.00
	- Papan Visual/Papan Nama	1	26,675,000.00
	- Alat Penghancur Kertas	4	106,287,500.00
	- Papan Pengumuman	1	8,500,000.00
	- Alat Kantor Lainnya	126	2,123,774,592.00
	- Meja Kerja Kayu	1	29,997,000.00
	- Kursi Besi/Metal	6	14,520,000.00
	- Meja Rapat	1	18,975,000.00
	- Meja Resepsionis	6	14,125,000.00
	- Meja 1/2 Biro	11	13,500,000.00
	- Kursi Tamu	1	1,000,000.00
	- Kursi Putar	30	51,678,000.00
	- Meja Komputer	19	60,592,500.00
	- Sofa	1	1,275,000.00
	- Meubeler lainnya	10	16,500,000.00
	- Lemari Es	1	1,930,500.00
	- A.C. Window	17	83,453,000.00
	- A.C. Split	4	25,150,000.00
	- Televisi	5	29,425,000.00
	- Sound System	1	108,000,000.00
	- Wireless	2	2,420,000.00
	- Camera film	2	19,210,000.00
	- Handy Cam	2	8,030,000.00
	- Gordyin/Kray	1	102,850,000.00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1,100,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	1,100,000.00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	69	1,029,363,250.00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	40	596,288,000.00
	- Digital LED Running Text	1	14,300,000.00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	21	348,378,250.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Layar Film/Projector	2	57,497,000.00
	- Handy Talky (HT)	4	11,880,000.00
	- Facsimile	1	1,020,000.00

Sumber : SIMDA, 2024

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur berdasarkan 2 sasaran strategis, yaitu **“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”**, dan **“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”**

Tinjauan evaluasi atas kinerja pelayanan Badan Pengelola PAjak Daerah dari Tahun 2022 sampai dengan 2024 dilakukan dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Kinerja BPPDRD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	14.34	101 %	12.87	90.6 %	13.49	101 %
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	61.02	93.8 %	65	94.2 %	69,22	97 %

Sumber : LKJIP BPPDRD Tahun 2024

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indicator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- a. **Sasaran 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Indikator : Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan rumus hitung :

Presentase Peningkatan PAD dari
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah =
$$\frac{(\text{PDRD 2024} - \text{PDRD 2023})}{\text{PDRD 2023}} \times 100\%$$

Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana pada table 3.5 diatas Capaian kinerja Tahun 2022 dan 2024 adalah sama yaitu 101% pada Tahun 2022 sebesar 14.34 atau terealisasi sebesar 101 %, mengalami penurunan dari realisasi maupun tingkat capaiannya pada tahun Tahun 2023 menjadi 12.87 dengan tingkat capaian 90.6% atau menurun 1.47% dari realisasi tahun sebelumnya dan menurun 10,4% dari capaian Tahun 2022 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2024 menjadi 13.49 dengan Capaian 101%, meningkat realisasi sejumlah 0.62% capaiannya dari Tahun 2023 dan 10.4% dari Capaian di 2023.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tercermin pada table berikut :

Tabel 2.6 Perbandingan PAD Tahun 2022, 2023 dan 2024

No.	Uraian	2022	2023	2024	Peningkatan / Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	811,249,650,355.18	892,824,394,215.84	977,586,034,227	84,761,640,011.40	9.49
2	Pajak Daerah	623,584,889,978.40	715,889,547,764.50	809,678,437,973	93,788,890,208.50	13.10
3	Retribusi Daerah	40,110,966,976.50	52,196,511,543.82	62,005,985,055	9,809,473,511.18	18.79
4	Pajak dan Retribusi Daerah	663,695,856,954.90	768,086,059,308.32	871,684,423,028	103,598,363,719.68	13.49

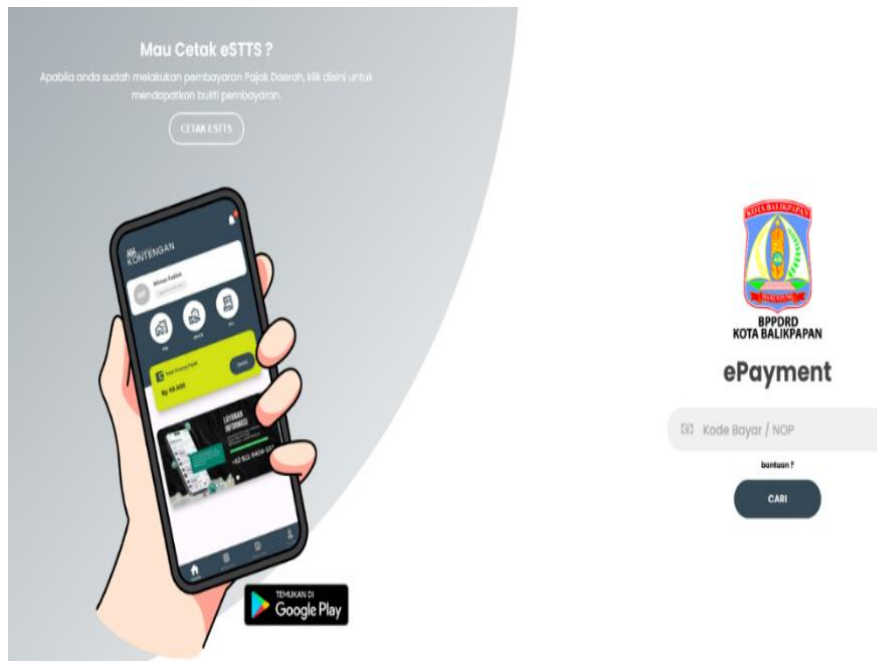
Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam mendukung kinerja Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, antara lain:

a. Digitalisasi pembayaran Pajak Daerah

Dengan digitalisasi atau elektronifikasi pembayaran pajak daerah memudahkan wajib pajak untuk dapat melakukan pembayaran pajak daerah mereka melalui gadget mereka ataupun melalui merchant2 (indomaret, dll) dan ewallet yang mereka miliki seperti Gojek, QRIS, Go pay, Tokopedia, Sehingga memudahkan wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Gambar 2. 2 Pembayaran Online Pajak Daerah



sumber : website BPPDRD (s.id/epayment)

b. Upaya Penegakan Hukum Pajak Daerah

- Dalam Hal Adanya Tunggakan Pajak Daerah Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran dan melewati tanggal jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak daerah dan sanksi administrasi
- Memberikan teguran tertulis berupa surat pemanggilan 1 s.d 3 kepada pengusaha yang tidak/belum mendaftarkan sebagai Wajib Pajak;
- Memberikan teguran tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar dan belum lapor; dan
- Melakukan pemasangan stiker terhadap wajib pajak yang tidak melapor dan tidak mendaftar

Gambar 2.3 Pemasangan stiker untuk Wajib Pajak yang menunggak



Sumber : Instagram BPPDRD

c. Monitoring Objek Pajak Daerah

Monitoring ini dilakukan secara rutin maupun insidental atau acara yang tidak rutin pada saat event tertentu. Upaya ini dilakukan dengan pengawasan Pajak Daerah, output yang diharapkan yaitu jumlah pelaporan Pajak yang dilakukan secara Self Assestment (Pelaporan Mandiri) sesuai dengan keadaan di lapangan, terutama Pajak Hiburan

Gambar 2.4 Monitoring Objek Pajak Hiburan Konser Musik



Sumber : Instagram BPPDRD

d. Pemutakhiran Data Pajak Daerah melalui Updating data pajak daerah dan Penyesuaian NJOP PBB-P2

Pemutakhiran ini untuk memisahkan antara Wajib Pajak Daerah yang aktif dan pasif sehingga untuk wajib pajak yang tidak aktif untuk tidak tercantum dalam

Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tahun berikutnya, juga dilakukan Updating data, mengingat validitas data merupakan hal yang penting dalam pencapaian ataupun penentuan target pajak daerah. Selain itu, updating data juga dapat berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam membayar pajak.

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak pada beberapa wilayah yang belum sesuai antara data yang ada dengan kondisi di lapangan, misalnya luas bangunan objek pajak dan belum terdapat bangunan sebelumnya,

e. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan-kebijakan terbaru, terutama terkait kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak, dilakukan dengan sosialisasi Langsung dengan Wajib Pajak Daerah atau dengan media Radio, Instagram dan media online lainnya. Dengan tujuan menumbuhkan daya minat wajib pajak dalam menunaikan pajaknya.

Gambar 2.5 Sosialisasi Pajak Daerah



Sumber : Instagram BPPDRD

- b. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Indikator : Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dari segi Realisasi maupun Capaian Kinerja tersebut. Ini terlihat dari table diatas, dimana di tahun 2022

nilainya 61.02 meningkat 3.98 Poin menjadi 65 di Tahun 2023 dan kembali naik di 2024 menjadi 69.22 meningkat 4.22 Poin serta capaiannya di 2022 sebesar 93.8% dan meningkat 0.4 % di Tahun 2023 menjadi 94.2% dan meningkat kembali di tahun 2024 sejumlah 2.8% tingkat capaiannya menjadi 97%. Namun masih belum tercapai dikarenakan dalam 3 tahun terakhir belum mencapai 100%.

Beberapa hal yang menjadi factor penyebab kegagalan tidak tercapainya Nilai SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain :

- a. Evaluasi kinerja belum dilakukan secara berkala
- b. Pohon kinerja telah dibuat menyesuaikan dengan IKU namun belum dapat mengidentifikasi kinerja untuk sector lain yang berada dibawahnya (Crosscutting)
- c. Laporan kinerja baru sebagian besar saja yang telah mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan dan realisasi kinerja dari tahun- tahun sebelumnya, serta informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan upaya penyempurnaannya

Adapun upaya yang akan dilakukan kedepannya agar mencapai target yaitu :

1. Melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala
2. Melakukan identifikasi Crosscutting kinerja dari staff sampai ke pimpinan sehingga didapatkan keselarasan dan kesesuaian hingga Indikator dan Target Sasaran Strategis yang akan dicapai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Memperbaiki laporan kinerja dengan mempertajam isi laporan tersebut sehingga laporan tersebut dapat mudah dipahami dan dijadikan evaluasi untuk laporan kinerja tahun berikutnya

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.4.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan khususnya dalam mendukung agenda pembangunan dan menunjang urusan pemerintah daerah di bidang keuangan, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa permasalahan yang berdampak terhadap pelayanan dan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Beberapa permasalahan tersebut dapat teridentifikasi berdasarkan karakteristik faktor penyebab yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi dengan menggunakan analisa S-W-O-T (Strength, Weakness, Opportunities, Threat guna menemukan potensi permasalahan dan isu

strategis yang dapat berdampak terhadap kinerja tugas dan fungsi pelayanan. Adapun Analisa SWOT Badan Pengelola Pajak Dearah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dapat diidentifikasi menurut Gambar 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.7 Analisis S-W-O-T Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
INTERNAL	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup mendukung dalam mencapai target penerimaan pajak daerah 2. Tersedianya Sumberdaya manusia yang berpengalaman dan punya komitmen dalam mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan 3. Tersedianya Peraturan Daerah tentang penerimaan pajak daerah yang terbaru.	1. Kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi, sehingga pengelolaan teknologi informasi yang ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal. 2. Belum tersedianya Peraturan Walikota terkait petunjuk teknis Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah untuk masing2 pajak Daerah 3. Kurangnya sumberdaya manusia (Jabatan fungsional) yang memiliki keahlian khusus penilaian, pemeriksaan, penagihan dan penyitaan Pajak Daerah sehingga pengelolaan dan pengawasan Pajak Daerah belum optimal. 4. Administrasi perpajakan yang masih bermasalah seperti data obyek dan subyek pajak yg Kurang tepat , dll. 5. Jumlah piutang Pajak Daerah yang terlampau besar
	PELUANG (OPPORTUNITIES)	ANCAMAN (THREATS)
EKSTERNAL	1. Potensi pertumbuhan ekonomi Balikpapan dan Pembangunan IKN yang berdampak terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Terlaksananya Kerja Sama antara Pemerintah Bapenda Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan lainnya dalam rangka Pemungutan Pajak Daerah dan Opsen Pajak Daerah;	1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh dan kurang menyadari kewajibannya membayar pajak 2. Masih adanya Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai ketentuan 3. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha wajib pajak

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Identifikasi Permasalahan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersaji pada table berikut ini :

Tabel 2.8 Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya Kemandirian Fiskal Daerah	1. Belum optimalnya pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	Pemberlakuan regulasi nasional yang berdampak terhadap perubahan skala kewenangan pengelolaan PAD Kota Balikpapan.
		Pembinaan Kerja sama dengan Pemerintah Kab/ Kota belum sepenuhnya terlaksana secara aktif dan terintegrasi khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah,
	2. Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajaknya	Pelayanan operasional yang belum sepenuhnya menjangkau warga Balikpapan
	3. Masih tingginya piutang Pajak Daerah	Diperlukannya optimalisasi pemutakhiran Data Objek Pajak guna mendukung kegiatan Pendataan dan Penagihan
	4. Menurunnya tariff Pajak Daerah, seperti Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Undang-Undang HKPD

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

2.4.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Dari Analisi Masalah dan Identifikasi Permasalahan, dapat ditentukan isu strategis yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD), yaitu :

- **Belum Optimalnya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**
Belum maksimalnya Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, Masih tingginya piutang Pajak Daerah, dan menurunnya tarif pajak daerah, seperti pajak hiburan dan paker menjadi pendorong isu strategis ini. Potensi Daerah yang menjadi kewenangan,

Permasalahan, Isu KLHS dan ISu Lingkungan yang turut menjadi factor dalam penentuan isu strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.9 Teknis Menyimpulkan Isu Strategis BPPDRD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pendapatan Asli Daerah yang besar yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Belum maksimalnya Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Dampak Lingkungan Balikpapan sebagai Kota Penyangga IKN (Ibu Kota Negara)	Ketidakpastian ekonomi global	Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Belum Optimalnya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah
	2. Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya					
adanya dukungan undang-undang HKPD terhadap peningkatan PAD	3. Masih tingginya piutang Pajak Daerah		Tata kelola ekonomi global			
	4. menurunnya tarif pajak daerah, seperti pajak hiburan dan parkir					

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Balikpapan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD menjadi salah satu pilar penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran BPPDRD ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, khususnya dalam bidang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Tujuan tersebut menggambarkan arah jangka menengah yang ingin dicapai, sementara sasaran merupakan hasil nyata yang diharapkan sebagai ukuran keberhasilan.

Tujuan dan Sasaran tersebut tergambar dalam Tabel 3.1 Sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran BPPDRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
		Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)	13,21	30,09	6,00	6,18	6,35	6,53	6,70	
			Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)	220	4,53	5,00	7,70	10,40	13,10	15,80	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,22	73,00	73,14	73,32	74,02	74,68	75,00	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Berdasarkan tabel diatas bawa Indkator kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Indikator Tujuan

Indikator tujuan pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (tax assignment) maupun aspek pengeluaran (expenditure assignment). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (public goods/public service). Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Suatu daerah otonom diharapkan

mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut Definisi Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dapat diartikan sebagai ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

- Keterangan :
- PAD = Total PAD tahun t, dengan satuan Rp.
 - TPD = Total Penerimaan Daerah tahun t, dengan satuan Rp.
 - DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, dengan satuan Persen (%)

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu :

- a. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah
Rumus yang digunakan untuk pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah sebagai berikut :

$$((\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun } t - \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun } t-1) / \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun } t-1) \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Pajak Daerah} = \frac{(\text{Pajak}_t - \text{Pajak}_{t-1})}{\text{Pajak}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pertumbuhan Pajak Daerah = Peningkatan PAD tahun t, dengan satuan Persen (%).

Pajak_t = Total Pajak tahun t, dengan satuan Rp.

Pajak_{t-1} = Total Pajak tahun t-1, dengan satuan Rp.

b. Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah

Rumus yang digunakan untuk pertumbuhan penerimaan Retribusi Daerah sebagai berikut :

$$((\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun } t - \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun } t-1) / \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun } t-1) \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan Retribusi Daerah} = \frac{(\text{Retribusi}_t - \text{Retribusi}_{t-1})}{\text{Retribusi}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

Pertumbuhan Retribusi Daerah = Peningkatan PAD tahun t, dengan satuan Persen (%).

Retribusi_t = Total Retribusi tahun t, dengan satuan Rp.

Retribusi_{t-1} = Total Retribusi tahun t-1, dengan satuan Rp.

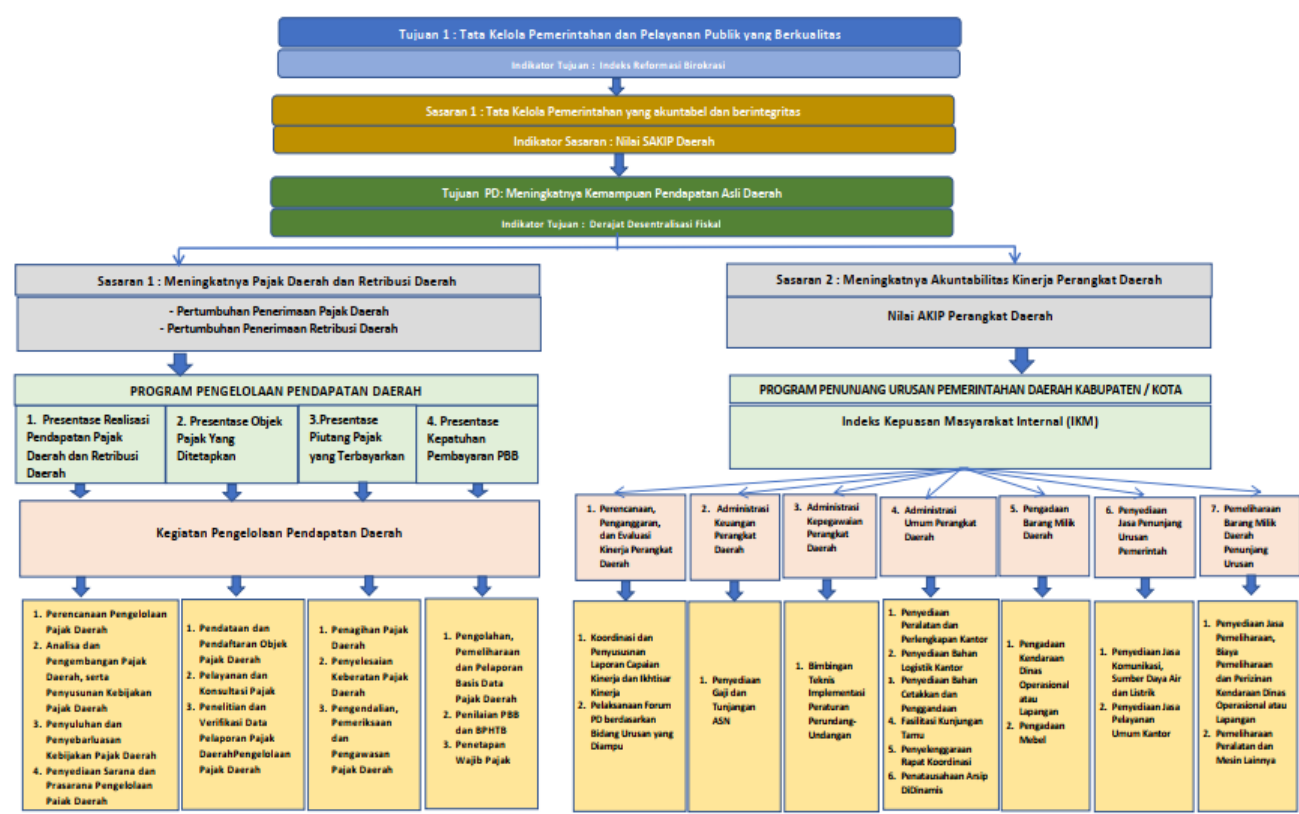
c. Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)

- ✓ Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

3.2 Cascading Kinerja

Cascading kinerja perangkat daerah adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan target kinerja dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pegawai paling bawah dalam suatu organisasi pemerintah. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap level organisasi memiliki tujuan dan indikator yang selaras, sehingga seluruh elemen bekerja menuju pencapaian visi dan misi yang sama. Cascading Kinerja Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tergambar seperti gambar berikut ini

Gambar 3.1
Cascading Kinerja BPPDRD



Sumber : Data Diolah, BPPDRD

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Strategi dan Kebijakan yang akan dituangkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Rumusan strategi dan kebijakan yang berpedoman pada strategi dan kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Balikpapan. Adapun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025-2029 tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan BPPDRD

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Perbaikan tata kelola kelembagaan dan birokrasi	1. Peningkatan kualitas Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			2. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan penyebaran informasi kepada Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya	
			3. Penurunan piutang Pajak Daerah	
			4. Optimalisasi tarif pajak daerah, seperti pajak hiburan dan parkir	
			5. Peningkatan pengawasandan pembinaan terhadap objek pajak	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

Strategi yang dipergunakan dalam mendukung arah kebijakan tersebut, antara lain :

- 1. Penguatan Basis Data Pajak dan Retribusi Daerah
 - o Pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.
 - o Pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak secara berkala berbasis teknologi informasi dan geospasial.

2. Optimalisasi Pendataan Lapangan

- Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur dalam melakukan verifikasi, validasi, dan pendataan objek pajak serta retribusi.
- Penerapan metode survei, sensus, dan audit lapangan untuk menjamin keakuratan data.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi

- Integrasi data dengan perangkat daerah terkait, instansi vertikal, dan pihak ketiga (seperti BPN, Disdukcapil, dan perbankan).
- Pemanfaatan sistem digital (GIS, e-mapping, e-sensus) untuk memetakan potensi objek pajak dan retribusi.

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi Indikator Kinerja Utama (IKU), Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran .

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tabel 4.1 Program Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN					74.390.735.000		76.622.457.000		80.453.580.000		82.452.532.000		84.524.532.000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					64.647.979.550		64.600.475.398		68.209.777.898		69.213.729.898		71.285.729.898	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	85	85,2	64.647.979.550	85,5	64.600.475.398	85,7	68.209.777.898	86	69.213.729.898	86,2	71.285.729.898	BPPDRD
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102	
Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	86,07	87,26	87,78	3.625.393.917	88,14	5.671.981.602	88,67	5.148.802.102	89,23	5.398.802.102	89,72	5.398.802.102	BPPDRD
Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan (%)	88,12	88,36	88,87	984.128.035	89,14	1.050.000.000	89,45	1.200.000.000	89,88	1.350.000.000	90,04	1.350.000.000	BPPDRD
Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	88,72	89,27	89,64	1.321.344.733	90,13	1.350.000.000	90,44	1.550.000.000	90,76	1.750.000.000	91,05	1.750.000.000	BPPDRD
Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	53,03	54,24	54,78	3.811.888.765	55,17	3.950.000.000	55,62	4.345.000.000	56,14	4.740.000.000	56,52	4.740.000.000	BPPDRD
TOTAL KESELURUHAN					74.390.735.000		76.622.457.000		80.453.580.000		82.452.532.000		84.524.532.000	

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPPDRD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Kemampuan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah (%)		
					Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah (%)		
		Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah			Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah (%)		
					Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak			Persentase Objek Pajak Yang Ditetapan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Tabel 4.3 Program dan Pendanaan BPPDRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				74.390.735.000		76.622.457.000		80.453.580.000		82.452.532.000		84.524.532.000		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				64.647.979.550		64.600.475.398		68.209.777.898		69.213.729.898		71.285.729.898		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Nilai)	85	85,2	64.647.979.550	85,5	64.600.475.398	85,7	68.209.777.898	86	69.213.729.898	86,2	71.285.729.898	BPPDRD	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				149.594.000		170.000.000		180.000.000		195.000.000		205.000.000		
IKM Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	149.594.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	195.000.000	1	205.000.000		
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan				99.594.000		110.000.000		110.000.000		120.000.000		125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	99.594.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000		
5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.000.000		60.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				59.889.497.130		59.333.475.398		62.852.777.898		63.800.729.898		65.800.729.898		
IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	110	59.889.497.130	110	59.333.475.398	110	62.852.777.898	110	63.800.729.898	110	65.800.729.898		
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				59.889.497.130		59.333.475.398		62.852.777.898		63.800.729.898		65.800.729.898		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	70	110	59.889.497.130	110	59.333.475.398	110	62.852.777.898	110	63.800.729.898	110	65.800.729.898		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tunjangan ASN (Orang/bulan)													
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000		300.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		
IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	40	50	300.000.000	50	300.000.000	50	315.000.000	50	320.000.000	60	325.000.000		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				300.000.000		300.000.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	40	50	300.000.000	50	300.000.000	50	315.000.000	50	320.000.000	60	325.000.000		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.330.075.870		2.335.000.000		2.365.000.000		2.380.000.000		2.405.000.000		
IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	2.330.075.870	1	2.335.000.000	1	2.365.000.000	1	2.380.000.000	1	2.405.000.000		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	14		13		13		13		13			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				601.243.070		550.000.000		560.000.000		565.000.000		570.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	14	601.243.070	13	550.000.000	13	560.000.000	13	565.000.000	13	570.000.000		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				553.911.800		555.000.000		555.000.000		560.000.000		565.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	553.911.800	2	555.000.000	2	555.000.000	2	560.000.000	2	565.000.000		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				475.000.000		480.000.000		485.000.000		485.000.000		490.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	475.000.000	1	480.000.000	1	485.000.000	1	485.000.000	1	490.000.000		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				99.921.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	99.921.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500.000.000		550.000.000		565.000.000		570.000.000		580.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	500.000.000	1	550.000.000	1	565.000.000	1	570.000.000	1	580.000.000		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				449.650.000		900.000.000		915.000.000		920.000.000		925.000.000		
IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	10	449.650.000	10	900.000.000	10	915.000.000	10	920.000.000	10	925.000.000		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6		5		5		5		5			
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				449.650.000		850.000.000		865.000.000		870.000.000		875.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	10	449.650.000	10	850.000.000	10	865.000.000	10	870.000.000	10	875.000.000		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6	6	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.257.600		382.000.000		382.000.000		388.000.000		390.000.000		
IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	299.257.600	1	382.000.000	1	382.000.000	1	388.000.000	1	390.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa				251.165.000		185.000.000		185.000.000		190.000.000		190.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	251.165.000	1	185.000.000	1	185.000.000	1	190.000.000	1	190.000.000		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				48.092.600		197.000.000		197.000.000		198.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	48.092.600	1	197.000.000	1	197.000.000	1	198.000.000	1	200.000.000		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.229.904.950		1.180.000.000		1.200.000.000		1.210.000.000		1.235.000.000		
IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75	1.229.904.950	75	1.180.000.000	75	1.200.000.000	75	1.210.000.000	75	1.235.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70		70		70		70		70			
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				890.534.950		800.000.000		815.000.000		825.000.000		835.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	75	75	890.534.950	75	800.000.000	75	815.000.000	75	825.000.000	75	835.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				339.370.000		380.000.000		385.000.000		385.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	70	70	339.370.000	70	380.000.000	70	385.000.000	70	385.000.000	70	400.000.000		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (%)	53,03	54,78	3.811.888.765	55,17	3.950.000.000	55,62	4.345.000.000	56,14	4.740.000.000	56,52	4.740.000.000	BPPDRD	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.190	1	3.811.888.765	1	3.950.000.000	1	4.345.000.000	1	4.740.000.000	1	4.740.000.000		
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	217.401	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				2.001.381.780		2.000.000.000		2.200.000.000		2.400.000.000		2.400.000.000		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	2.001.381.780	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.400.000.000	1	2.400.000.000		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas				1.560.519.785		1.800.000.000		1.980.000.000		2.160.000.000		2.160.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.190	1	1.560.519.785	1	1.800.000.000	1	1.980.000.000	1	2.160.000.000	1	2.160.000.000		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				249.987.200		150.000.000		165.000.000		180.000.000		180.000.000		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	217.401	1	249.987.200	1	150.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000		
Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (%)	86,07	87,78	3.625.393.917	88,14	5.671.981.602	88,67	5.148.802.102	89,23	5.398.802.102	89,72	5.398.802.102		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8	8	3.625.393.917	8	5.671.981.602	8	5.148.802.102	8	5.398.802.102	8	5.398.802.102		
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	11	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	220	240		270		300		320		350			
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				756.872.000		900.000.000		950.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	11	1	756.872.000	1	900.000.000	1	950.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				475.800.000		1.000.000.000		326.820.500		326.820.500		326.820.500		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	2	1	475.800.000	1	1.000.000.000	1	326.820.500	1	326.820.500	1	326.820.500		
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				987.643.213		2.071.981.602		2.071.981.602		2.071.981.602		2.071.981.602		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	8	8	987.643.213	8	2.071.981.602	8	2.071.981.602	8	2.071.981.602	8	2.071.981.602		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				1.405.078.704		1.700.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	220	240	1.405.078.704	270	1.700.000.000	300	1.800.000.000	320	2.000.000.000	350	2.000.000.000		
Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan (%)	88,12	88,87	984.128.035	89,14	1.050.000.000	89,45	1.200.000.000	89,88	1.350.000.000	90,04	1.350.000.000		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102		
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	1	1	984.128.035	1	1.050.000.000	1	1.200.000.000	1	1.350.000.000	1	1.350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)														
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11	11				8				8				
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				400.875.635		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000			
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1	1	400.875.635	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000			
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				280.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		400.000.000			
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	11	11	280.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	8	400.000.000	8	400.000.000			
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				303.252.400		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000			
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1	303.252.400	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	450.000.000			
Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan (%)	88,72	89,64	1.321.344.733	90,13	1.350.000.000	90,44	1.550.000.000	90,76	1.750.000.000	91,05	1.750.000.000			
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				9.742.755.450		12.021.981.602		12.243.802.102		13.238.802.102		13.238.802.102			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	1.321.344.733	2	1.350.000.000	2	1.550.000.000	2	1.750.000.000	2	1.750.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1					
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				464.951.833		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	464.951.833	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				100.000.000		100.000.000		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				300.000.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		450.000.000		
Terlaksannnya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	2	2	300.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan				456.392.900		500.000.000		550.000.000		600.000.000		600.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	2	2	456.392.900	2	500.000.000	2	550.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daeah Kota Balikpapan mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan fungsi tersebut terdapat sub kegitan prioritas dalam mendukung fungsi itu, yaitu :

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas BPPDRD

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Meningkatnya ketercapaian target Pajak dan Retribusi Daerah	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
		Meningkatnya kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah	
		Meningkatnya optimalisasi pendataan objek pajak	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
		Menurunnya nilai piutang Pajak Daerah	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan utama yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan strategis organisasi. Dalam konteks Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), IKU biasanya berkaitan dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan wajib pajak, dan kinerja kelembagaan.

Dalam melaksanakan kinerja di bidang Keuangan telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPDRD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,22	73	73,14	73,32	74,02	74,68	75	
3.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	%	13,21	30,09	6	6,18	6,35	6,53	6,7	
4.	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	%	220	4,53	5	7,7	10,4	13,1	15,8	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPPDRD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	positif	%	26,53	30,84	40,77	36,18	36,28	38,57	41,34	
2.	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	positif	%	13,21	30,09	6,00	6,18	6,35	6,53	6,7	
3.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	positif	Nilai	69,22	73,00	73,14	73,32	74,02	74,68	75	
4.	Pertumbuhan Penerimaan Retribusi Daerah	positif	%	220	4,53	5,00	7,7	10,4	13,1	15,8	
5.	Presentase Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	positif	%	53,03	54,24	54,78	55,17	55,62	56,14	56,52	
6.	Presentase Piutang Pajak Daerah Yang Terbayarkan	positif	%	88,72	89,27	89,64	90,13	90,44	90,76	91,05	
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	positif	Nilai	85	85,00	85,20	85,50	85,70	86,00	86,2	
8.	Persentase Objek Pajak Yang Ditetapkan	positif	%	88,12	88,36	88,87	89,14	89,45	89,88	90,04	
9.	Persentase Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	positif	%	86,07	87,26	87,78	88,14	88,67	89,23	89,72	
10.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	positif	%	0,53	0,54	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60	
11.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	positif	(%)	2,61	2,612	2,614	2,616	2,618	2,62	2,622	

Sumber : Data Diolah, BPPDRD

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan tentang pelaksanaan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan BPPDRD

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah terverifikasi dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja. Karena itu, Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Renja perangkat daerah.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan SAKIP Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan sebagai pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja perangkat dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan target kinerja Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai pengatur arah perkembangan organisasi dalam meraih keberhasilan di masa mendatang dengan partisipasi dan respon dari semua stakeholdernya. Hal ini merupakan manifestasi dari respon Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun eksternal, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak- dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders dan terutama seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan akan dapat tercapai bila didukung oleh seluruh pegawai yang ada dan pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung.